

## ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS*

Oleh:

**Erika Sri Nurhadi<sup>1</sup>**

**Galuh Ayu Bunga Tiara<sup>2</sup>**

**Revienda Anita Fitri<sup>3</sup>**

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Kota Surabaya, Jawa Timur (60213).

Korespondensi Penulis: [erika.22118@mhs.unesa.ac.id](mailto:erika.22118@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *The government is shifting BBM subsidies to target recipients and to balance the APBN's ability to face the challenges of the global economy. President's Decree No. 98 of 2022 established a subsidy budget of Rs. 502.4 trillion but was shifted because of the limited capacity of the APBN and the aim of distributing subsidies more accurately. The purpose of this writing is to analyze how the decision-making of the government in the transfer of BBM subsidies to meet the needs of the people in Indonesia is seen using the Tree Analysis method. The results found by the author in the use of tree analysis there are three aspects of cause: budgetary aspects, target aspects, and environmental aspects. With crude oil prices rising, the government decided to tackle the increasing burden of APBN by diverting BBM subsidies and adjusting prices to the crude oil genes that received subsidies. This is done to optimize the State Purchasing Revenue Budget (APBN) and meet the needs of the community.*

**Keyword:** *Subsidy Shifting, Decision Making, Society, Government.*

**Abstrak.** Pemerintah mengalihkan subsidi BBM sesuai dengan sasaran penerima dan untuk menyeimbangkan kemampuan APBN dalam menghadapi tantangan perekonomian global. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 menetapkan anggaran subsidi sebesar Rp 502,4 triliun, tetapi dialihkan karena kemampuan APBN yang terbatas dan tujuan

Received April 14, 2024; Revised April 28, 2024; May 06, 2024

\*Corresponding author: [erika.22118@mhs.unesa.ac.id](mailto:erika.22118@mhs.unesa.ac.id)

# ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS*

untuk mendistribusikan subsidi dengan lebih tepat sasaran. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis bagaimana pengambilan keputusan dari pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM guna pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia dilihat menggunakan metode Tree Analysis. Hasil yang ditemukan penulis dalam menggunakan tree analysis terdapat tiga aspek penyebab yakni aspek anggaran, aspek sasaran dan aspek lingkungan. Karena harga minyak mentah melonjak, pemerintah memutuskan untuk mengatasi beban APBN yang semakin meningkat dengan mengalihkan subsidi BBM dan menyesuaikan harga terhadap jeni-jenis minyak mentah yang menerima subsidi. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan memenuhi kebutuhan masyarakat.

**Kata Kunci:** Pengalihan Subsidi, Pengambilan Keputusan, Masyarakat, Pemerintah.

## LATAR BELAKANG

Salah satu yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat saat ini yaitu BBM (Bahan Bakar Minyak) seringkali digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. BBM menjadi sumber energi bagi kendaraan bermotor, bahan bakar minyak ini berbentuk cair.

Pendapat yang dikemukakan oleh Nugroho (2005: 2), ialah:

*“BBM adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pemurnian (refining) minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diproses terlebih dahulu di kilang untuk menghasilkan produk minyak bumi, termasuk bahan bakar. Penyulingan minyak mentah juga menghasilkan berbagai produk lain, seperti gas, naphtha, wax sulfur ringan, dan aspal.”*

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan jikalau persediaan minyak bumi yang ada di negara Indonesia diperkirakan akan ada hingga 9,5 tahun. Dengan menggunakan bahan bakar fosil dalam jangka lebih lama lagi akan menyebabkan kurangnya jumlah bahan bakar minyak. Menurut data yang dikumpulkan oleh *Integrated Green Business* (IEC), Indonesia menjadi salah satu negara dengan konsumsi energi yang terbilang tinggi di dunia, dengan konsumsi sebesar 7% per tahun. Persentase pertumbuhan ini didistribusikan ke sektor industri sebesar 50%, transportasi sebesar 34%, rumah tangga sebesar 12%, dan komersial sebesar 4%. Hampir 95% dari konsumsi energi Indonesia berasal dari bahan bakar minyak (BBM). Meskipun

saat Covid-19 di tahun 2020 konsumsi pertalite turun, namun pada tahun 2021 masyarakat Indonesia mengonsumsi lebih banyak pertalite daripada jenis lainnya. Di tahun 2022 konsumsi BBM mengalami kenaikan sebesar 18,14 juta kiloliter. Sedangkan pada data tahun 2021 konsumsi pertamax (RON 92) meningkat sebesar 5,71 juta kiloliter. Konsumsi BBM jenis premium (RON 88) meningkat sebesar 3,35 juta kiloliter, dan konsumsi solar (CN51) meningkat sebesar 701 juta kiloliter. Jumlah energi BBM yang dikonsumsi masyarakat dipengaruhi oleh harga minyak mentah dunia.

Dampak yang luas terhadap perekonomian Indonesia, subsidi telah lama menjadi subjek diskusi kebijakan fiskal. BBM selaku kebutuhan pokok manusia dan indikator makro ekonomi, merupakan komponen utama dari subsidi yang diberi oleh pemerintah Republik Indonesia. Pengalihan kebijakan subsidi membentuk keniscayaan, karena adanya gejolak geopolitik dan perekonomian global menjadikan harga bahan bakar minyak mengalami kenaikan. Dunia mengalami gejolak ekonomi pada tahun 2019, karena adanya pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan perekonomian dan menyebabkan krisis di banyak negara.

Selama pandemi Covid-19 masih berlangsung, penghentian aktivitas ekonomi, pembatasan aktivitas sosial, dan penanganan kesehatan pasien yang terinfeksi COVID-19 menjadi masalah utama. Di tengah pemulihan ekonomi nasional, terjadi tantangan tambahan bagi ekonomi global, seperti peningkatan harga bahan pokok yang disebabkan oleh konflik antara Rusia dan Ukraina pada 24 februari 2022. Hal ini dianggap sebagai operasi militer khusus yang bertujuan untuk meremajakan dan denazifikasi Ukraina. Oleh invasi yang dilakukan oleh Rusia ini menyebabkan hubungan *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) terganggu. Dikarenakan konflik Rusia-Ukraina, harga minyak mentah dan gas bumi melonjak, mencapai puncaknya pada triwulan kedua dan ketiga tahun 2022. Peningkatan harga ini berdampak pada kebijakan penyesuaian subsidi gas bumi tahun 2022. Harga minyak mentah dan gas alam meningkat dari tahun 2000 hingga awal tahun 2022, diikuti oleh kenaikan harga puncak pada kuartal kedua dan ketiga tahun. Kenaikan harga ini melatarbelakangi kebijakan dari pemerintah mengenai pengalihan subsidi BBM pada tahun 2022.

Dilansir dari [Kemenkeu.go.id](https://www.kemenkeu.go.id) Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan upaya semaksimal mungkin dalam melindungi masyarakat dari fluktuasi harga minyak dunia. Mengingat Perpres Nomor Nomor 98 Tahun 2022

# **ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS***

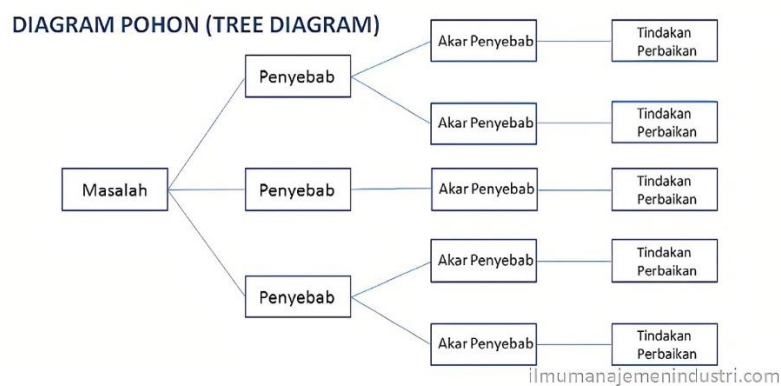
menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi tahun 2022 dari yang sebelumnya anggaran APBN 152,5 triliun rupiah menjadi 502,4 triliun rupiah, maka pemerintah memutuskan untuk membantu. Minyak untuk pembiayaan yang lebih tepat sasaran (pembiayaan BBM). Ditengah lonjakan harga global, pemerintah berupaya untuk menekan harga BBM agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Hal ini dilakukan dengan peningkatan tiga kali lipat anggaran subsidi dan kompensasi BBM yang sebelumnya Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun. maka pemerintah mengambil keputusan untuk membantu. Karena fluktuasi harga di seluruh dunia, pemerintah melakukan upaya untuk mempertahankan tingkat BBM sehingga masyarakat umum tidak menjadi tidak stabil.

Negara-negara di dunia sering dikaitkan dengan minyak mentah, yang menjadi komponen penting dalam proses bisnis. Minyak menjadi komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Aktivitas ekonomi dalam skala mikro dan makro sangat dipengaruhi oleh ketersediaan minyak mentah, pertumbuhan ekonomi akan melonjak jika aktivitas ekonomi didukung dengan melakukan input yang baik. Karena harga dan kinerja minyak mentah menjadi tolak ukur perekonomian global, minyak mentah memainkan peran penting dalam ekonomi suatu negara.

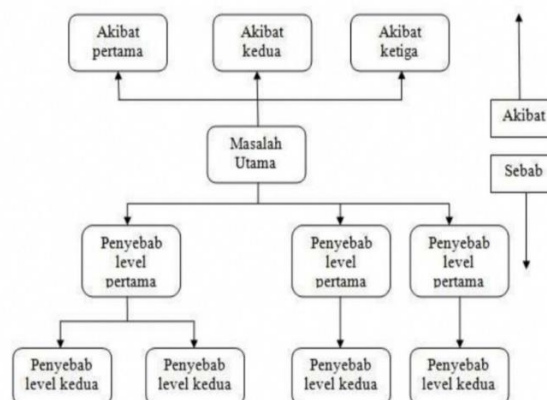
Indonesia importir minyak mentah dan memiliki ekonomi terbuka kecil. Impor minyak mentah Indonesia meningkat 97,71% dari tahun sebelumnya, mencapai US\$14,37 miliar dari Januari hingga Juli 2022 hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik. Hingga saat ini, permintaan domestik telah mengalami peningkatan yang signifikan, tetapi harga komoditas minyak mentah global tetap tinggi, ini berarti guncangan harga minyak akan berdampak pada ekonomi. Masyarakat hanya menggunakan minyak tanah, solar, dan premium sebagai sumber energi, meskipun pemerintah juga memberikan subsidi BBM yang diberikan oleh Pertamina. Alokasi anggaran untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) terus meningkat meskipun pemerintah menaikkan harganya. Ini disebabkan oleh peningkatan defisit dan belanja, yang membuat subsidi tidak dapat dihindari meskipun harga BBM meningkat. Dengan adanya ini menjadi akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan masalah subsidi sejak awal.

Dengan menggunakan metode Analisis Pohon Masalah (*Tree Analysis*) yang tentunya sangat berguna dalam perencanaan dengan membantu menemukan solusi dengan memetakan antara sebab dan akibat. Struktur pohon masalah (*Tree Analysis*)

dapat membantu dalam memecahkan bagian-bagian yang dapat didefinisikan dan memberikan tujuan yang jelas. Memberikan gambaran jelas mengenai isu-isu yang ada saat ini yang mana memiliki penyebab dengan ujung yang memang terkadang memiliki masalah ataupun gejala yang sama. Analisis Pohon Masalah memiliki dua model yang memiliki perbedaan dengan model satu yang menjelaskan penyebab level pertama, penyebab level kedua, dan seterusnya. Analisis Pohon Masalah model kedua memiliki struktur yang berbeda dengan akar sebagai penyebab masalah utama, badan pohon sebagai masalah utama, dan daun sebagai akibat dari masalah utama. Sehingga model kedua memiliki pemetaan antara sebab dan akibat.



**Gambar 1.1 Pohon Masalah Model 1**



**Gambar 1.2 Pohon Masalah Model 2**

Pada penelitian ini menggunakan analisis pohon masalah (*Tree Analysis*) model kedua untuk mengetahui penyebab permasalahan pengalihan subsidi BBM guna pemenuhan kebutuhan masyarakat di Indonesia.

# **ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS***

## **KAJIAN TEORITIS**

Dari penelitian (Sidabutar, 2022) membahas mengenai penyebab kenaikan harga BBM yang mana hal ini dapat berpengaruh pada konsumsi di masyarakat. Hal ini sesuai dengan (Harmono, 2022) mengatakan bahwa pengalihan subsidi bahan bakar minyak berpengaruh meningkatkan inflasi pada tahun penerapan pengalihan subsidi. Karena adanya pengalihan subsidi yang berpengaruh pada masyarakat, sehingga pemerintah melakukan kebijakan stimulus untuk membuktikan kinerja konstitusional hal ini diungkapkan oleh (Qabil, et.al. 2022).

Meskipun pengalihan subsidi BBM berpengaruh pada masyarakat, tetapi menurut (Hasan, 2018) dilakukan dengan tujuan untuk mengoptimalkan APBN serta pengalihan subsidi BBM dari konsumtif ke produktif, tetapi belum adanya transparansi dan akuntabilitas anggaran yang dapat diakses oleh masyarakat, sehingga perlu dilakukan pengawasan atau *monitoring*. Penggunaan BBM yang konsumtif ini menurut (Wardani, et. al. 2022) juga disebabkan karena adanya pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 juga disebabkan adanya peperangan negara sehingga distribusi minyak dunia terganggu. Dari lima penelitian terdahulu memiliki kesinambungan dengan penelitian yang dilakukan saat ini. Penyebab dari peralihan BBM pun dilatarbelakangi oleh hal yang sama. Dengan metode Tree Analysis akan didapatkan penyebab-dampak peralihan subsidi BBM pada pemenuhan kebutuhan masyarakat.

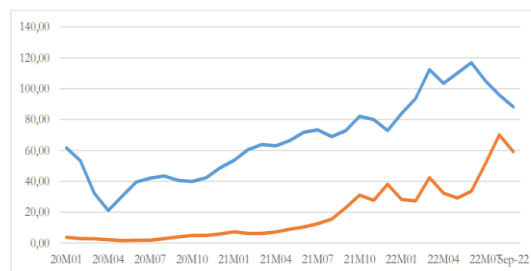
## **METODE PENELITIAN**

Pada penelitian dengan judul Analisis Pengambilan Keputusan Pemerintah dalam Pengalihan Subsidi BBM Guna Pemenuhan Kebutuhan Menggunakan Metode *Tree Analysis* dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dijalankan melalui serangkaian kajian pustaka dan literature review dari berbagai sumber. Pengumpulan data dengan literature review melalui lima sumber penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian saat ini. Dengan menggunakan studi literatur dapat memperkuat analisis dan didukung oleh berbagai sumber yang memiliki kedalaman teori. Studi literatur melibatkan membaca artikel, jurnal, situs web, dan sumber lain yang terkait dengan topik penelitian untuk memperoleh pemahaman dan dasar teori yang diperlukan untuk menganalisis serta mendukung pembahasan penelitian ini.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, artinya diperoleh dari temuan penelitian sebelumnya, bukan dari pengamatan langsung. Peneliti menggunakan database Google Scholar untuk melakukan pencarian jurnal yang dipublikasikan di internet mengenai kebijakan pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM guna pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian kualitatif, teknik analisis data terdiri dari beberapa langkah, termasuk reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Reduksi data melibatkan kegiatan untuk memilah data yang telah dikumpulkan. Penyajian data adalah proses penyusunan informasi yang memungkinkan penarikan kesimpulan, sedangkan langkah akhir dalam penelitian kualitatif yakni memastikan kesimpulan yang diambil sesuai dengan data yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kebijakan Pengalihan Subsidi BBM



**Gambar 1. Fluktuasi Harga Minyak, Natural Gas, dan Batu Bara**

Sumber: worldbank.org

Dilansir dari setkab.go.id, pemerintah pusat secara resmi mengambil keputusan dan mengumumkan pengalihan subsidi untuk Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini disampaikan Presiden RI Joko Widodo di Istana, Jakarta. Tujuan dari subsidi BBM ini adalah untuk membuat subsidi yang disediakan oleh pemerintah lebih adil dan tepat sasaran. Presiden menyatakan bahwa lebih dari 70 persen dari subsidi hanya diterima oleh segmen masyarakat yang lebih mampu, yang berarti bahwa uang negara tersebut seharusnya diprioritaskan dalam pemberian subsidi kepada segmen masyarakat yang kurang mampu.

Pemerintah mengambil keputusan dalam keadaan yang sulit dengan mengalihkan subsidi BBM dan menyesuaikan harga beberapa jenis bahan bakar yang sebelumnya

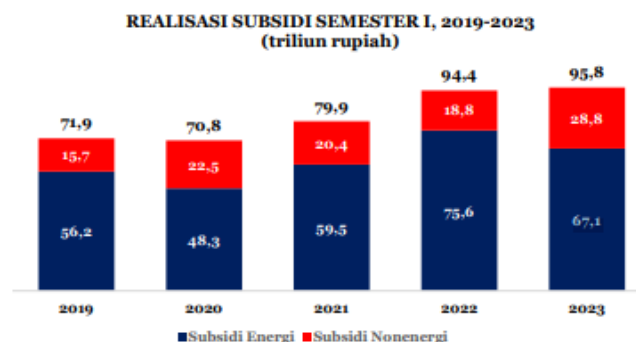
# ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS*

mendapat subsidi. Pasca dampak pandemi COVID-19, tahun 2022 merupakan awal mula masa pemulihan perekonomian negara. Hal tersebut ditandai dengan peningkatan kegiatan dan mobilitas masyarakat, serta kegiatan perekonomian yang semakin berangsur pulih. Keadaan pada masa pemulihan pasca pandemi berbeda dengan masa pandemi. Permintaan sudah mulai meningkat, namun pasokan belum sepenuhnya pulih. Terjadinya kekurangan energi dan bahan baku di setiap negara menyebabkan melonjaknya harga bahan baku. Konflik Rusia-Ukraina dan sanksi perdagangan yang mengakibatkan gangguan pada distribusi pasokan sehingga semakin meningkatkan tekanan pada harga komoditas global.

Dengan adanya keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam pengalihan subsidi BBM ini, pemerintah memberikan bantuan sosial bagi masyarakat. Yang pertama, memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dengan anggaran sebesar Rp 12,4 triliun, Selanjutnya pemerintah juga melakukan penyaluran bantuan Subsidi Gaji/Upah (BSU) ditujukan bagi 16 juta pekerja dengan alokasi anggaran sebesar Rp9,6 triliun. Selain itu, Presiden memberi wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengalokasikan 2% dana Transfer Umum untuk bantuan ojek online, bantuan angkutan umum dan para nelayan senilai Rp 2,17 triliun.

## Subsidi BBM guna Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

Pada hakikatnya Kebijakan subsidi BBM dirancang oleh pemerintah dengan tujuan untuk menekan adanya harga BBM di dalam negeri, akibat dari semakin meningkatnya harga minyak di pasar internasional supaya harga minyak dalam negeri tetap berada pada tingkat yang terjangkau untuk masyarakat.



Gambar 2. Realisasi subsidi pada tahun 2019-2023

Sumber: Kementerian Keuangan



Program pengelolaan belanja subsidi dirancang untuk memberikan keringanan kepada masyarakat dan menjaga daya beli sekaligus memastikan produsen dapat memproduksi barang dan jasa, terutama yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu, subsidi bertujuan untuk meningkatkan produksi pertanian, meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya di sektor transportasi dan komunikasi, serta menciptakan insentif ekonomi dan sosial. Anggaran belanja subsidi APBN tahun 2023 ditetapkan sebesar 298,5 triliun rupiah, dengan rincian subsidi energi sebesar 212,0 triliun rupiah dan subsidi non energi sebesar 86,5 triliun rupiah. Realisasi belanja subsidi pada semester I tahun 2023 sebesar Rp 95,8 triliun atau setara 32,1% dari pagu APBN 2023. Realisasi subsidi tersebut terdiri dari subsidi energi sebesar Rp 67,1 triliun atau 31,6% dari pagu APBN tahun 2023. Gabungan subsidi tahun 2023 dan non-energi akan mencapai Rp 28,8 triliun atau 33,2% dari batas APBN tahun 2023. Realisasi belanja subsidi sangat dipengaruhi oleh perkembangan asumsi makro ekonomi seperti harga minyak, nilai tukar mata uang, dan jumlah subsidi yang beredar.

Menurut Kementerian Keuangan, proporsi subsidi BBM dalam jumlah total kekayaan nasional secara konsisten lebih tinggi dari proporsi investasi infrastruktur dalam jumlah keseluruhan kekayaan negara. Dengan demikian, proporsi subsidi bahan bakar terhadap total belanja pemerintah mencapai 14,2% pada tahun 2012. Proporsi total subsidi BBM lebih tinggi dibandingkan dengan proporsi belanja infrastruktur yakni sebesar 11,7%.

Selain itu, Presiden Joko Widodo mengumumkan strategi pemerintah untuk mengendalikan inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar. Menurut Presiden Jokowi, cara taktisnya adalah dengan menjamin kelancaran arus barang, khususnya sembako, agar tidak terhambat dan harus terus diawasi di lapangan, yang biasa disebut dengan blusukan. Selain itu, pemerintah juga akan terus memantau ketersediaan barang di pasaran. Oleh karena itu, masyarakat tidak sulit mencari kebutuhan pokok sehingga dijual dengan harga tinggi oleh para pedagang. Misalnya melakukan pemeriksaan jumlah sisa barang atau item yang tersedia di grosir dan distributor.

Ketika subsidi BBM meningkat dari tahun ke tahun, belanja anggaran pemerintah menjadi semakin mahal. Penetapan target subsidi bahan bakar yang tidak akurat oleh pemerintah membuat masyarakat dengan daya beli rendah dan masyarakat miskin tidak dapat memperoleh manfaat dari subsidi dan dana kompensasi yang diberikan kepada

# **ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS***

masyarakat yang terkena dampak. Pasalnya, distribusi subsidi masih belum merata ke seluruh lapisan masyarakat dan hanya sedikit masyarakat di Pulau Jawa, khususnya perkotaan, yang tinggal di pulau lain seperti Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Mereka masih membayar harga BBM, jauh lebih tinggi dibandingkan harga BBM di Jawa (Muhardi, 2005).

Dengan adanya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, para Konsumen minyak dalam negeri terlindungi dari perubahan atau peningkatan harga minyak di pasar internasional. Konsekuensi yang didapat dari adanya subsidi tersebut adalah peningkatan kebutuhan anggaran subsidi bahan bakar bagi pemerintah dan penyempitan cakupan kebutuhan dan kepentingan prioritas lainnya. Besar kecilnya alokasi dana untuk subsidi BBM dalam APBN dipengaruhi oleh perubahan harga minyak internasional.

## **Keterkaitan antara Pengalihan Subsidi BBM dengan Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat**

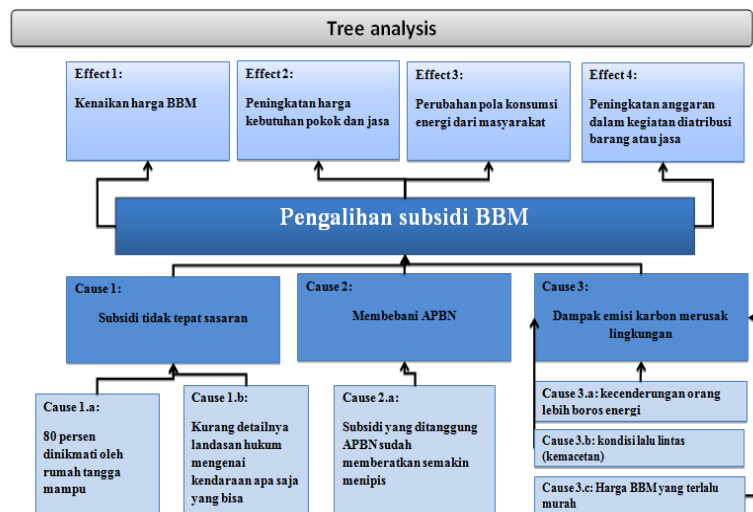
Pengambilan keputusan pemerintah mengenai pengalihan subsidi berpengaruh terhadap kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Dalam kegiatan pemenuhan kebutuhan masyarakat membutuhkan bahan bakar dimana dalam kegiatannya seperti dalam mobilitas yang dilakukan masyarakat dan kegiatan distribusi yang mana apabila subsidi bahan bakar ini dialihkan akan berdampak pada proses kegiatan masyarakat. Dilansir dari kemenkeu.go.id pengambilan keputusan pemerintah dalam Pengalihan Subsidi BBM memberikan tekanan terhadap komoditas barang dan jasa. Komoditas barang atau komoditas jasa merupakan aspek yang penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Selain itu, efek dari pengambilan keputusan dalam pengalihan subsidi BBM akan dirasakan secara luas oleh masyarakat umum dan kemungkinan akan menyebabkan perubahan dalam perilaku konsumen atau kebutuhan masyarakat umum.

Saleh Abdurrahman, Direktur Pusat Komunikasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan tingkat subsidi BBM berada di atas tingkat kewajaran karena sebagian besar APBN terfokus pada sektor minyak dan energi. Dengan demikian, masih terdapat bidang lain seperti infrastruktur dan kesehatan, di mana ada fluktuasi yang sangat sedikit. Berdasarkan kajian *World Bank*, penikmat dari subsidi BBM separuhnya merupakan masyarakat yang memiliki status ekonomi menengah

kebawah sebanyak 84 persen. Adanya kebijakan terkait pengalihan subsidi yang dilakukan pemerintah ini, berpotensi mencegah adanya pemanfaatan disparitas harga BBM yang disalahgunakan oleh oknum di dalam dan luar negeri. Yang mana hal ini seluruh masyarakat Indonesia dan juga negara.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, pengalihan subsidi BBM memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Perencanaan yang baik dan kolaborasi dari semua pemangku kepentingan diperlukan untuk memaksimalkan manfaat dari keputusan yang diambil. Dengan peralihan subsidi BBM, anggaran sebelumnya dapat digunakan untuk program pendidikan, kesadaran lingkungan, dan kesejahteraan sosial.

### Metode Tree Analysis



**Gambar 2. Tree Analysis pengalihan subsidi BBM.**

Penulis menggunakan metode *tree analysis* dalam proses analisis pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam kebijakan pengalihan subsidi BBM. Berdasarkan *tree analysis* tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab dari pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam kebijakan pengalihan subsidi BBM disebabkan oleh beberapa aspek. Aspek yang pertama yakni aspek lingkungan yang mana emisi karbon yang dihasilkan oleh penggunaan BBM pada kendaraan bermotor atau mobil menjadi pertimbangan pemerintah dalam pengambilan keputusan pengalihan subsidi, dalam hal ini terdapat tiga yang menjadi penyebab kerusakan lingkungan yakni adanya kecenderungan orang untuk boros energi, kondisi lalu lintas atau kemacetan dan harga BBM yang cenderung murah yang mana hal ini menimbulkan pola konsumsi energi yang berlebihan di masyarakat,

# **ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS***

Selanjutnya aspek anggaran yakni hal ini berkaitan dengan alokasi APBN yang digunakan untuk subsidi BBM yang mana hal ini membebani APBN yang disebabkan oleh subsidi yang sebelumnya yang ditanggung oleh APBN sudah memberatkan dan kemudian semakin menipis. Yang terakhir yakni aspek sasaran yang mana hal ini terdapat indikasi tidak tepatnya sasaran subsidi BBM yang menjadi pertimbangan utama dari pemerintah dalam pengambilan keputusan mengenai pengalihan subsidi BBM yang disebabkan oleh dua hal yakni 80 persen subsidi BBM dinikmati oleh rumah tangga mampu dan terdapat kurang detailnya landasan hukum atau regulasi mengenai kendaraan apa saja yang bisa mendapatkan kuota subsidi BBM. Pengambilan keputusan oleh pemerintah dalam kebijakan pengalihan subsidi BBM memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat. Dampak atau *effect* yang ditimbulkan dari pengambilan keputusan pemerintah yakni kenaikan harga BBM yang mana dalam hal ini otomatis terjadi penyesuaian harga BBM, peningkatan harga kebutuhan pokok dari masyarakat, selanjutnya terjadi perubahan pola konsumsi energi dari masyarakat hal ini berkaitan dengan harga yang sebelumnya lebih murah atau rendah membuat masyarakat yang sebelumnya kecenderungan boros dalam penggunaan energi melalui pengalihan subsidi BBM masyarakat menjadi lebih hemat dalam konsumsi energi sehingga terdapat perubahan pola yang sebelumnya boros menjadi lebih hemat, yang terakhir terjadi peningkatan anggaran dalam kegiatan distribusi barang atau jasa hal ini berkaitan dengan proses pengiriman barang atau berdampak pada tempat ekspedisi barang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dioptimalkan dengan penghapusan subsidi BBM dan penyesuaian harga terhadap beberapa jenis BBM yang selama ini mendapatkan subsidi., dikarenakan harga minyak mentah yang mengalami lonjakan sehingga pemerintah mengambil tindakan untuk mengatasi beban APBN yang semakin tinggi. Pengalihan subsidi BBM ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengalokasikan APBN untuk infrastruktur atau kebutuhan lainnya. Terlepas dari kenyataan bahwa ini akan meningkatkan tekanan langsung dan tidak langsung pada pemenuhan kebutuhan dan ekonomi, serta meningkatkan biaya barang dan jasa di masyarakat, pemerintah memberikan solusi dengan bantalan beberapa

bantuan, seperti BLT-BBM, Subsidi BSU, dan DTU, hal ini dilakukan dengan harapan agar subsidi dapat tepat sasaran.

Pada penelitian ini, metode Tree Analysis digunakan untuk mengidentifikasi penyebab, dan dampak dari pengalihan subsidi BBM untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat. Didapatkan bahwa penyebab pertama pada aspek lingkungan, dimana adanya kecenderungan untuk boros energi, kemacetan lalu lintas, dan pola konsumsi BBM yang berlebih. Penyebab selanjutnya pada aspek anggaran yang mana membebani APBN karena naiknya harga minyak mentah dunia. Kemudian penyebab pada aspek sasaran masyarakat pengguna BBM bersubsidi yang tidak tepat dan kurang detailnya regulasi akan kendaraan yang dapat menggunakan subsidi BBM. Pengalihan subsidi BBM ini tentu berdampak pada kenaikan harga BBM, peningkatan harga kebutuhan pokok masyarakat, perubahan pola konsumsi energi, dan peningkatan anggaran dalam distribusi barang dan jasa.

Penulis melihat bahwa di Indonesia pengalihan subsidi BBM menjadi fenomena bagi masyarakat. Pemerintah harus mencari solusi untuk fenomena ini. Adapun saran dari penulis sebagai masukan, antara lain:

1. Transparansi dan detail akan regulasi hukum mengenai kendaraan yang boleh dan tidak boleh menggunakan subsidi BBM, agar subsidi BBM dapat tepat sasaran. Kurangnya pengawasan atau *monitoring* dari pihak berwenang pada pengguna atau masyarakat yang menjadi sasaran subsidi BBM ini.
2. Penguatan dalam hal pengawasan atau *monitoring* dari pihak berwenang menjadi sasaran pada pengguna atau masyarakat yang menjadi sasaran subsidi BBM ini.

## DAFTAR REFERENSI

*D8.1 Problem Tree Analysis - Procedure and Example STEP-BY-STEP PROCEDURE OF A PROBLEM TREE ANALYSIS.* (n.d.).

Eka, V. (2022). *PRO KONTRA PENGHAPUSAN BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI.* Vol. XIV, No. 1/Puslit/Januari/2022. [puslit.dpr.go.id](https://puslit.dpr.go.id)

Harmono, W., Kementerian, W. H., Republik, K., & Direktorat, I. (n.d.). DI INDONESIA. *Jurnal Ekonomi Kreatif Dan Manajemen Bisnis Digital*, 1(2), 2022. <https://transpublika.co.id/ojs/index.php/JEKOMBITAL>

# ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMERINTAH DALAM PENGALIHAN SUBSIDI BBM GUNA PEMENUHAN KEBUTUHAN MENGGUNAKAN METODE *TREE ANALYSIS*

- Hasan, J. M. (2018). DAMPAK PENCABUTAN SUBSIDI BBM BAGI KEUANGAN NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE. In *Jurnal Renaissance* / (Vol. 3, Issue 01). e-ISSN : 2527-564X Website jurnal : <http://www.ejournal-academia.org/index.php/renaissance>
- Kemenkeu.go.id. 4 September 2022. .Pemerintah Mengalihkan Sebagian Subsidi BBM untuk Bantuan yang Lebih Tepat Sasaran. Diakses pada 14 April 2024. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Mengalihkan-Sebagian-Subsidi-BBM>
- Kurniawati, L. (n.d.). (2017). *DAMPAK PENURUNAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK: ANALISIS SISTEM NERACA SOSIAL EKONOMI INDONESIA*.
- Kominfo.go.id. 05-01-2015. Pengalihan Subsidi BBM Sejahterakan Rakyat. Diakses 15 April 2024. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/4345/pengalihan-subsidi-bbm-sejahterakan-rakyat/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/4345/pengalihan-subsidi-bbm-sejahterakan-rakyat/0/berita_satker)
- Pratikto, A. (n.d.). *Pengaruh Kebijakan Pengalihan Subsidi Bahan Bakar Minyak (Bbm) Untuk Pendidikan Anak-anak di Rumah Tangga Miskin* (Issue 2).
- Qabil, C., Purba, C., Shamira, M., Prabowo, P., Ernawati, N., Hanafiah, R. W., Nugroho, A., & Hermawan, S. (2022). SINERGI TARIK ULUR KENAIKAN BBM, KEBIJAKAN STIMULUS PERPAJAKAN DAN DAMPAK EKONOMI. In *Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum* (Vol. 5).
- Setkab.go.id. 3 September 2022. Pemerintah Alihkan Subsidi BBM agar Lebih Tepat Sasaran. Diakses pada 14 April 2024. <https://setkab.go.id/pemerintah-alihkan-subsidi-bbm-agar-lebih-tepat-sasaran/>
- Suharto, S. (2023). *KEBIJAKAN PROGRAM SUBSIDI BBM*. [www.penerbitwidina.com](http://www.penerbitwidina.com)
- Wardani, W., Umami Arfah, S., Sojuangon Lubis, P., & Alwashliyah Medan Corresponding Author, U. (2022). *All Fields of Science J-LAS Dampak Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) Terhadap Inflasi dan Implikasinya Terhadap Makroekonomi di Indonesia Impact of the increase in fuel oil (BBM) on inflation and its implications for macroeconomics in Indonesia*. 2(3), 63–70. <https://j-las.lemkomindo.org/index.php/AFoSJ-LAS/index>